PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH PROVINSI BALI**

UNIT KERJA : **RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NI MADE SURYANADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **987438**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.083.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 831.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/265 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 2.000.000
3. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
4. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.170.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FJ 40 JEEP Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 376.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 570.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.227.336.353**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**5.426.336.353**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**640.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**4.786.336.353**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.